KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : SKK Migas Diusulkan Jadi BUMN
Tanggal : Jumat, 29 Juli 2022
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 9

| PERCEPATAN INVESTASI |

SKK MIGAS DIUSULKAN JADI BUMN

Bisnis, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas diusulkan menjadi badan khusus yang mengelola dana migas yang dipungut melalui skema *petroleum fund*.

Nyoman Ary Wahyudi
nyoman.ary@bisnis.com

Usulan penguatan SKK Migas disampaikan Komisi VII DPR untuk dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Migas yang ditargetkan rampung pada pertengahan tahun depan.

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa penguatan SKK Migas menjadi badan usaha khusus dilakukan agar bisa mengurusi sepenuhnya tata kelola hulu migas, termasuk membenahi pendanaan, eksplorasi, serta meningkatkan kepercayaan investor pada sektor tersebut.

Lewat revisi UU Migas, kata dia, badan usaha khusus itu bakal mengelola dana migas yang dipungut dari industri hulu melalui skema *petroleum fund*. Selain itu, badan usaha khusus tersebut akan difokuskan untuk melakukan eksplorasi dan mengelola cadangan migas nasional.

"Badan usaha khusus itu bisa dalam bentuk badan usaha milik negara [BUMN] yang secara khusus mengelola sektor hulu," kata Sugeng saat ditemui di Jakarta Convention Center, Kamis (28/7).

Sugeng menerangkan bahwa pembentukan badan khusus itu mesti dilakukan untuk menguatkan kegiatan eksplorasi dan pengelolaan cadangan migas yang selama ini dilakukan secara terbatas oleh SKK Migas.

"Yang ada saat ini eksplorasi dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama [KKKS], tetapi mereka hanya fokus pada wilayah kerjanya untuk menyiapkan cadangan mereka sekaligus portofolionya," kata dia.

Terkait dengan *petroleum fund*, dia menjelaskan, dana tersebut diproyeksikan untuk mengurangi ketergantungan kegiatan industri hulu migas pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan begitu, APBN nantinya hanya akan berfungsi sebagai stimulan dari setiap kegiatan hulu migas. "Kita mau berkomitmen betul di hulu migas itu dengan adanya *petroleum fund*, pajak, ekspor, dan pungutan-pungutan migas," kata dia.

Penyelesaian revisi Undang-Undang (UU) Migas sendiri diyakini bisa memperbaiki iklim investasi hulu migas di dalam negeri yang saat ini dinilai tidak menarik bagi investor. Hal itu pun tecermin dari sejumlah perusahaan multinasional yang angkat kaki dari Indonesia.

Pendiri Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan bahwa revisi UU Migas sangat diperlukan untuk membenahi banyaknya pungutan yang memberatkan investor saat melakukan kegiatan eksplorasi di Indonesia.

Dia menjelaskan, salah satu penyebab banyaknya pungutan tersebut adalah UU Migas Nomor 22/2001, khususnya terkait prinsip *assume and discharge* dalam hal pungutan dan pajak dan tidak lagi bisa diterapkan di sistem kontrak yang ada.

"Revisi UU Migas sejak lama sudah disuarakan, tapi tidak kunjung dilakukan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai usulan penguatan kelembagaan SKK Migas sebagai hal yang positif. Hal itu pun dipercaya akan mendorong sentimen positif pada iklim investasi hulu migas Tanah Air.

Alasannya, kata Mamit, sebagian besar investor atau KKKS tidak ingin SKK Migas masuk ke dalam PT Pertamina (Persero) yang saat ini menjadi *holding* BUMN sektor migas. Selain itu, investor juga tidak setuju jika SKK Migas digabung dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena dinilai bisa menghambat proses birokrasi.

"Kalau SKK Migas jadi BUMN khusus tentu ada penguatan, posisi SKK Migas ke depannya untuk menjadi pengawas tidak hanya untuk hulu migas, tetapi juga geotermal yang saat ini berada di bawah Direktorat EBTKE [Kementerian ESDM]," kata Mamit.

KEWENANGAN KUAT

Sebagai badan usaha khusus, Mamit mengatakan, SKK Migas ke depan bakal memiliki kewenangan yang cukup kuat secara undang-undang untuk melakukan pengawasan, anggaran, hingga kerja sama dengan KKKS pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di blok migas dalam negeri.

Lewat revisi undang-undang itu, menurutnya, kinerja SKK Migas juga akan disokong oleh *petroleum fund* atau pendanaan migas yang berasal dari hasil pungutan ekspor, pajak, dan transaksi yang terjadi di sektor hulu migas.

Pendanaan itu nantinya akan digunakan untuk membiayai sejumlah inisiatif yang berkaitan dengan cadangan migas nasional.

"Kita bisa eksplorasi, meningkatkan EOR [*enhanced oil recovery*] dengan dana yang sudah disiapkan. Bahkan dalam rencana awal ini ketika harga minyak tinggi akan ada subsidi, sehingga harga BBM di hilir tidak terlalu tinggi," tuturnya.

Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) tidak mempersoalkan badan hukum SKK Migas nantinya. Direktur Eksekutif Aspermigas Moshe Rizal mengatakan bahwa KKKS memerlukan kepastian hukum dalam menjalankan setiap kegiatannya di dalam negeri.

"Apapun bentuknya [SKK Migas] yang terpenting bagi investor adalah kepastian hukumnya, kemudahan-kemudahan proses perizinan dan persetujuan," katanya.

Dia juga menilai usulan *petroleum fund* sebagai hal yang positif, karena bisa mempercepat kegiatan hulu migas nasional. Hanya saja, dia berharap *petroleum fund* diambil dari porsi pendapatan pemerintah, sehingga tidak membebani investor.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyayangkan realisasi investasi sektor hulu migas Indonesia yang relatif rendah di tengah tingginya harga komoditas sejak awal tahun ini.

Ma'ruf meminta Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk segera merumuskan kebijakan fiskal yang atraktif untuk menarik minat investor berinvestasi di Indonesia.

"Untuk mendorong peningkatan investasi hulu Migas, saya minta agar Menteri ESDM dan juga Menteri Investasi merumuskan langkah-langkah yang dapat memberikan daya tarik fiskal bagi investor," kata Wapres, Rabu (27/7).

Ma'ruf beralasan realisasi investasi di sektor hulu migas baru mencapai US$3,8 miliar atau 36% dari target investasi yang ditetapkan pada tahun ini sebesar US$13,2 miliar. Padahal, Ma'ruf menuturkan, harga minyak mentah dunia sedang berada di posisi yang bagus untuk meningkatkan investasi di industri hulu migas domestik.

Dengan demikian, dia meminta, Arifin dan Bahlil untuk tidak ragu memangkas perizinan yang menghambat investasi pada sektor hulu migas di dalam negeri. Menurut dia, momentum kenaikan harga komoditas mesti ikut mengerek realisasi investasi di sektor hulu migas tersebut.

"Harga minyak dunia sudah menyentuh US$117 per barel dan harga gas US$90 per MMBTU, sehingga saat ini merupakan momentum terbaik untuk menarik investasi asing di hulu migas," tuturnya.

SKK Migas sendiri mencatat produksi siap jual atau *lifting* migas sepanjang semester I/2022 masih di bawah target.

Berdasarkan data yang dipaparkan SKK Migas, realisasi *lifting* minyak sepanjang Januari hingga Juni 2022 tercatat sebesar 616.600 barel per hari. Capaian itu tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan target *lifting* minyak pada APBN 2022 sebesar 704.000 barel per hari.

Sementara itu, realisasi *lifting* gas bumi sampai dengan semester I/2022 tercatat 5.326 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd). Jumlah itu tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan target APBN 2022 sebesar 5.800 MMscfd.